



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen
Hukumnya Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**



Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Puluhan Perwakilan Buruh Curhat ke Bupati Irsyad Yusuf



No image

Selasa, 6 Oktober 2020

Puluhan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Pasuruan melakukan audiensi dengan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menganggap UU tersebut tidak bermoral dan merugikan para buruh, terutama dengan penghapusan UMK dan UMSK, pengurangan pesangon, dan kontrak kerja seumur hidup. Buruh juga menolak outsourcing pekerja seumur

hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.

Mereka mengecam DPR RI yang telah mengesahkan UU tersebut tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya para buruh. Para buruh mengancam akan melakukan mogok kerja secara massal jika DPR RI atau pemerintah pusat tidak memberikan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh. Mereka bahkan menyebutkan bahwa beberapa perusahaan sudah mulai melakukan mogok kerja.

Bupati Irsyad Yusuf menyatakan akan meneruskan aspirasi para buruh kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden maupun DPR RI. Bupati Irsyad juga meminta para buruh untuk tidak melakukan tindakan ekstrem yang dapat memicu keributan.

Meskipun Bupati Irsyad mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, ia tetap berusaha untuk menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, khususnya para buruh, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan negara.

Para buruh sendiri menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dan menolak kebijakan yang merugikan. Ancaman mogok kerja yang mereka luncurkan menjadi bukti keseriusan mereka dalam menyuarakan protes terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ke depan,

perlu dilihat bagaimana pemerintah pusat merespon tuntutan para buruh dan apakah mereka akan merevisi UU tersebut agar lebih berpihak pada para pekerja.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

